



PIDATO HARI INTERNASIONAL MELAWAN UJARAN KEBENCIAN

Presiden Majelis Umum PBB Csaba Korosi (kedua dari kanan) berpidato pada acara tingkat tinggi untuk menandai peringatan Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian, di markas besar PBB di New York, pada Senin (19/6).

PBB Akhirnya Sahkan Traktat Laut Lepas

Setelah lebih dari 15 tahun diskusi, termasuk empat tahun negosiasi resmi, negara-negara anggota PBB akhirnya menyetujui teks perjanjian tersebut pada bulan Maret.

NEW YORK (IM) - Perjanjian internasional pertama di dunia untuk melindungi lautan lepas disahkan hari Senin (19/6) di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, berupa sebuah traktat atau perjanjian lingkungan penting yang dirancang untuk melindungi ekosistem terencil yang sangat penting bagi kemanusiaan.

United Nations High Seas Treaty adalah instrumen yang mengikat secara hukum konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional.

Melansir France24, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres memuji perjanjian tersebut sebagai "keberhasilan bersejarah" yang akan menetapkan kerangka hukum untuk meluaskan perlindungan lingkungan di perairan internasional, yang membentuk lebih dari 60 persen dari

seluruh lautan dunia.

Setelah lebih dari 15 tahun diskusi, termasuk empat tahun negosiasi resmi, negara-negara anggota PBB akhirnya menyetujui teks perjanjian tersebut pada bulan Maret.

Teks traktat tersebut telah ditinjau oleh para pengacara dan penerjemah PBB untuk memastikan kesesuaian dengan enam bahasa resmi badan tersebut.

"Samudra yang sehat, mulai dari perairan pantai hingga lautan lepas dan daerah dasar laut yang dalam, merupakan bagian integral dari kesehatan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia," catat sekelompok ilmuwan dalam jurnal *The Lancet*.

Ilmuwan semakin menyadari pentingnya lautan yang memproduksi sebagian besar oksigen yang kita hirup, membatasi perubahan iklim dengan menyerap CO₂, dan

menjadi tempat keanekaragaman hayati yang kaya, seringkali pada tingkat mikroskopis.

Namun, dengan begitu banyak lautan dunia berada di luar zona ekonomi eksklusif negara-negara individual, dan oleh karena itu tidak berada dalam yurisdiksi satu negara tunggal pun, memberikan perlindungan bagi yang disebut "lautan lepas" ini membutuhkan kerja sama internasional.

Lautan lepas sudah lama diabaikan dalam banyak perjuangan lingkungan, karena sorotannya lebih tertuju pada daerah pesisir dan beberapa spesies yang spesifik.

Alat kunci dalam perjanjian ini adalah kemampuan untuk menciptakan kawasan laut yang dilindungi di perairan internasional.

Saat ini, hanya sekitar satu persen dari lautan lepas yang dilindungi oleh tindakan konservasi apa pun.

Perjanjian ini dianggap penting bagi negara-negara dalam melindungi 30 persen lautan dan daratan dunia tahun 2030, seperti yang disepakati oleh pemerintah dunia dalam perjanjian sejarah terpisah yang dicapai di Montreal pada bulan Desember.

"Setelah diadopsi, maka dimulailah perlombaan untuk meratifikasi dan target 30 persen akan tetap dapat dicapai," kata Chris Thorne dari Greenpeace.

Perjanjian tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai perjanjian tentang Biodiversity Beyond National Jurisdiction atau "Keberagaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional" (BBNJ), juga memperkenalkan persyaratan untuk melakukan studi dampak lingkungan terhadap aktivitas yang dilakukan di perairan internasional.

Aktivitas-aktivitas tersebut, meskipun tidak tercantum dalam teks, akan mencakup segala hal mulai dari penangkapan ikan dan transportasi maritim hingga kegiatan kontroversial, seperti penambangan laut dalam atau bahkan program geo-engineering yang bertujuan untuk melawan pemanasan global.

Perjanjian ini juga menetapkan prinsip-prinsip pembagian manfaat "sumber daya genetik laut" (MGR) yang dikumpulkan melalui penelitian ilmiah di perairan internasional, titik sengketa yang hampir menggagalkan negosiasi pada menit-menit terakhir di bulan Maret.

Negara-negara berkembang, yang sering kali tidak punya uang untuk mendanai ekspedisi semacam itu, berjuang untuk mendapatkan hak berbagi manfaat, berharap tidak tertinggal dalam apa yang banyak orang lihat sebagai pasar masa depan yang besar dalam komersialisasi MGR, terutama oleh perusahaan farmasi dan kosmetik yang mencari "molekul ajaib."

Masih harus dilihat berapa banyak negara yang akan memutuskan untuk ikut serta.

LSM meyakini bahwa ambang batas 60 ratifikasi yang diperlukan agar perjanjian ini berlaku harus tercapai karena Koalisi untuk BBNJ, yang mendorong perjanjian ini, punya sekitar 50 negara anggota, termasuk anggota Uni Eropa, serta Chili, Meksiko, India, dan Jepang.

Namun, angka 60 jauh dari adopsi universal, karena PBB punya 193 negara anggota, yang diperjuangkan oleh para pembela lautan.

"Marilah kita mempertahankan momentum ini. Mari kita terus bekerja untuk melindungi samudra kita, planet kita, dan semua orang di dalamnya," kata Presiden Majelis Umum PBB Csaba Korosi. ● tom

Siswi di Jepang Buat Barikade untuk Tutupi Murid Berjilbab saat Pingsan

TOKYO (IM) - Sebuah momen haru viral di sosmed saat aksi murid di Jepang buat barikade tutupi siswi berhijab yang sedang pingsan dan hijabnya harus dibuka oleh sang guru untuk pertolongan.

Kronologi peristiwanya adalah saat itu, siswi berhijab yang pingsan adalah anak sulungnya yang bernama Ria.

Kala itu, sekolah putrinya sedang mengadakan hari Festival Olahraga Sekolah di Jepang bersama dengan teman sekelasnya dan melakukan aktivitas seperti perlombaan lompat tali.

Orang tua Ria mengaku sangat terharu melihat sikap toleransi orang Jepang terhadap putrinya yang beragama Islam.

Tiba-tiba sang anak terlihat kurang sehat dan wali kelasnya pun mendekati untuk mengetahui kondisinya.

Siswi berhijab itu pun tampak kelelahan dan lemas, sehingga ibu gurunya meminta untuk membuka sedikit hijab yang dipakainya agar sirkulasi udara lebih baik.

Sontak murid-murid lain yang tadinya masih melanjutkan perlombaan langsung mendekati teman sekelasnya yang sedang tak enak badan itu.

Mereka berkerumun sambil menutupi siswi berhijab yang sedang pingsan itu membentuk lingkaran untuk menutupi Ria agar sosoknya yang hijabnya terbuka sebagian tak dilihat orang banyak.

Sikap sigap ini bahkan tak hanya dilakukan oleh teman Ria yang saat itu tergabung dalam kelom-

pok perlombaan lompat tali, dari kejauhan murid lain pun turut menghampiri barikade lingkaran itu untuk menutupi Ria.

Wali kelas Ria pun meminta bantuan pada guru lainnya untuk membawa muridnya ke ruang kesehatan dengan tandu.

Menurut penuturan orang tuanya, Ria memang tidak mau kalau hijabnya dibuka. Hari pada saat kejadian juga cuaca sedang panas. Saat perlombaan lompat tali, putri sulungnya terkapar dan para guru harus membuka hijab putrinya agar udara masuk.

Tindakan guru dan siswi selanjutnya yang membuat orang tuanya terharu. Video yang diunggah langsung viral dan sudah ditonton lebih dari 129 ribu kali.

Ria adalah satu-satunya siswi berhijab di sekolahnya dan merupakan seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Saat Ria tiba-tiba pingsan, orang tuanya pun merasa sangat khawatir.

Kendati demikian, peraturan sekolah mengatakan wali yang hadir tidak boleh berinteraksi dengan anak-anak.

Sehingga ia hanya bisa pasrah dan mengawasi guru dan teman sekelas putrinya bekerja sama membantu anaknya.

Momen tersebut pun viral saat diunggah ulang oleh akun Twitter @recch-tapisayang pada 19 Juni 2023.

Beragam komentar berisi pujian pun ditinggalkan pengguna Twitter yang ikut merasa terharu dengan sikap toleransi anak-anak itu. ● tom

170 Orang Meninggal di India Akibat Gelombang Panas

NEW DELHI (IM) - Kini Gelombang panas menghantam berbagai negara termasuk India menyebabkan banyak orang terdampak. Diketahui hampir 170 korban meninggal dunia di sana.

Menurut laporan berita lokal dan pejabat kesehatan pada negara bagian utara Uttar Pradesh sebanyak 119 orang meninggal, karena penyakit terkait panas tinggi selama beberapa hari terakhir. Sementara negara bagian Bihar yang bertetangga, melaporkan 47 kematian.

Kondisi para tenaga kesehatan atau medis sangat sibuk. Bahkan seorang sopir mobil jenazah tak punya waktu istirahat. "Begitu banyak orang sekarat karena kepanasan sehingga kami tidak punya waktu se menit pun untuk beristirahat. Pada hari Minggu, saya membawa 26 jenazah," kata Jitendra Kumar Yadav, seorang

pengemudi mobil jenazah di kota Deoria, dilansir dari ABC4, Selasa (20/6).

Menteri Kesehatan Negara Bagian, Brajesh Pathak mengatakan, sudah mengirim tim yang akan menyelidiki apa penyebab banyaknya kematian. Apakah para korban benar-benar terdampak langsung dengan paparan panas.

Sementara wilayah utara India terkenal dengan panas terik selama bulan-bulan musim panas, yang mana suhunya konsisten di atas normal, menurut Departemen Meteorologi India. Dengan suhu tertinggi mencapai 43,5 derajat Celsius (110 derajat Fahrenheit).

Gelombang panas dinyatakan di India jika suhu setidaknya 4,5 C di atas normal, atau jika suhu di atas 45 C (113 F). Kondisi ini sudah pernah disampaikan oleh ilmuwan.

"Kami telah mengeluarkan

peringatan gelombang panas selama beberapa hari terakhir," kata Atul Kumar Singh, seorang ilmuwan di IMD

Kondisi ini dikatakan semakin parah karena adanya pemadaman listrik, yang konsisten di seluruh wilayah, membuat orang tidak memiliki aliran air, kipas angin, atau AC.

Kondisi Rumah Sakit di sana, dijelaskan Dr. Aditya Singh, seorang petugas medis darurat, kondisi rumah sakit di distrik Ballia sangat kacau. Situasinya begitu genting miinp pada awal pandemi Covid-19. Pasien sangat membutuhkan perawatan namun terlalu banyak orang yang sakit.

Bahkan kondisi, di koridor rumah sakit berbau pesing, bau sampah, dan bau limbah medis. "Semua staf kami telah berada di sini selama tiga hari berturut-turut dan kami terlalu banyak bekerja," kata Dr. Singh. ● ans



CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION

Seorang pria berjalan melewati stan China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) di Pameran Udara Internasional Paris ke-54 yang diadakan di Bandara Le Bourget dekat Paris, Prancis, Senin (19/6). Pameran Udara Internasional Paris ke-54 akan berlangsung hingga Minggu (25/6).

Palang Merah Internasional Sebut Ada 16 Juta Orang Pengungsi di Kawasan Arab

JENEWA (IM) - Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan ada sekitar 16 juta pengungsi di berbagai negara Arab akibat konflik yang sedang berlangsung, dan terbaru, yakni pertempuran di Sudan. Juru bicara regional ICRC, Imene Trabelsi, mengatakan kepada Anadolu, data pengungsi terbesar di kawasan Arab ini mencakup pengungsi Suriah, yang jumlahnya melebihi lima juta orang, sebagian besar berada di negara-negara tetangga, seperti Turki, Lebanon, Yordania, dan Irak.

"Pengungsi di negara-negara tetangga, terutama Lebanon dan Yordania, hidup dalam kerentanan yang terus bertambah, karena negara-negara tersebut menderita krisis ekonomi dan masalah internal, yang membuat situasi mereka di negara-negara tersebut semakin sulit," kata Trabelsi menjelaskan.

"Pada Hari Pengungsi Sedunia, perlu dicatat bahwa salah satu tantangan besar adalah gelombang pengungsi dari dunia Arab, yang sedang mengalami konflik bersenjata. Di Suriah saja, jumlah pengungsi internal melebihi enam juta orang; di Yaman, jumlahnya lebih dari lima juta orang," katanya.

Para pengungsi ini, menurut Trabelsi, menghadapi penderitaan yang nyata di daerah konflik. Mereka hidup dalam kondisi yang rapuh dan tidak dapat mengakses layanan yang paling mendasar seperti perumahan yang layak, layanan kesehatan dan air bersih.

"ICRC tidak hadir di perbatasan Turki di sisi Suriah, di mana terdapat pengungsi Suriah, karena Turkiye bukan zona konflik, dan Bulan Sabit Merah Turki menjalankan tugasnya dengan para pengungsi di sana," katanya.

Mengacu pada kasus Sudan, Trabelsi menunjukkan bahwa pertempuran antara tentara dan Pasukan Pendukung Cepat selama lebih dari sembilan minggu, telah berdampak pada penduduk. "Hal ini menyebabkan gelombang pengungsi dan migrasi internal yang sangat besar ke negara-negara tetangga, yang juga sedang mengalami konflik dan penderitaan."

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Rabu lalu mengumumkan terdapat 2,2 juta orang yang mengungsi secara paksa di dalam dan di luar Sudan. Angka ini meningkatkan jumlah total pengungsi dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal di dunia menjadi sekitar 110 juta orang pada bulan Mei, sebuah

angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Namun, jumlah pengungsi dan orang tertinggal di Sudan masih belum akurat, tetapi jumlahnya cukup besar dan kemungkinan besar akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan," kata Trabelsi. "Selain itu, kami melihat adanya peningkatan jumlah orang hilang yang telah dilaporkan oleh keluarga mereka."

Sebagai akibat dari pengungsi dan migrasi, keluarga-keluarga biasanya kehilangan kontak satu sama lain. "ICRC kemudian diberitahu bahwa mereka hilang, dan krisis ini kemungkinan besar akan meninggalkan bekas orang hilang yang sangat besar yang akan terus berlanjut selama bertahun-tahun setelah konflik berakhir," ujarnya.

Orang-orang hilang, juru bicara komite menjelaskan, sebagian karena pengungsian dan migrasi, tetapi juga karena banyak yang meninggal tanpa diketahui keluarga mereka. "Sulit untuk menemukan dan mengidentifikasi mayat-mayat tersebut, dan beberapa di antaranya ditahan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik."

Pertempuran di Sudan telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang lainnya, kata Kementerian Kesehatan di Khartoum pada Sabtu. Hari Pengungsi Sedunia dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengungsi dan orang-orang yang tertinggal di seluruh dunia dan menyoroti tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Trabelsi menyatakan penyesalannya atas berlanjutan konflik di dunia Arab.

"Solusi politik adalah pintu utama atau langkah dasar untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, dan dengan demikian menyelesaikan masalah para pengungsi dan orang-orang tertinggal. Periode mendatang kemungkinan akan sangat sulit bagi semua aktor kemanusiaan, termasuk Komite Palang Merah Internasional, mengingat krisis pendanaan yang terus berlanjut," katanya.

Kekurangan dana yang memadai, ia menyimpulkan, berdampak pada para pengungsi yang paling rentan. "Mereka yang terkena dampak dari konflik yang ada akan menerima persentase terendah dari layanan yang diperlukan dan layanan dasar. Mereka tidak menerima dukungan yang diperlukan karena terbatasnya kemampuan para aktor kemanusiaan untuk memberikan bantuan dan besarnya kebutuhan mereka [para pengungsi]. ● ans

Taliban Dilaporkan Lakukan Apartheid Gender Terhadap Perempuan Afghanistan

JENEWA (IM) - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situasi HAM Afghanistan Richard Bennett mengatakan, perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan dapat dikategorikan sebagai apartheid gender. Hal itu karena Taliban mengengak hak-hak dasar mereka.

"Diskriminasi yang parah, sistematis, dan terlembagakan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan inti dari ideologi serta aturan Taliban, yang juga menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin bertanggung jawab atas apartheid gender," kata Bennett seperti dikutip dari BBC Selasa (20/6).

Dia menjelaskan, PBB mendefinisikan apartheid gender sebagai diskriminasi seksual ekonomi dan sosial terhadap individu karena gender atau jenis kelamin mereka. "Kami telah menunjukkan perlunya lebih banyak eksplorasi apartheid gender, yang saat ini bukan merupakan kejahatan internasional, tetapi bisa menjadi demikian," ungkap Bennett.

"Tampaknya jika seseorang menerapkan definisi apartheid, yang saat ini untuk ras, pada situasi di Afghanistan dan menggunakan seks daripada ras, maka tampaknya ada indikasi kuat yang mengarah ke sana," tambah Bennett.

Dalam sebuah laporan yang mencakup Juli hingga Desember 2022, Bennett menemukan bahwa perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan mungkin sama dengan penganiayaan gender.

"Pencabutan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan yang serius ini dan penegakan keras oleh otoritas de facto atas tindakan pembatasan mereka dapat merupakan kejahatan

terhadap kemanusiaan dari penganiayaan gender," ujar Bennett.

Kehidupan perempuan di Afghanistan kembali dikedang oleh Taliban sejak mereka kembali berkuasa pada Agustus 2021. Anak perempuan dilarang melanjutkan pendidikan setelah mereka lulus sekolah dasar.

Sekolah menengah dan universitas tak diizinkan bagi mereka. Keputusan melarang perempuan Afghanistan berkuliah diambil Taliban pada Desember tahun lalu.

Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Nida Mohammod Nadim mengatakan, larangan perempuan berkuliah diperlukan guna mencegah percampuran gender di universitas. Dia meyakini beberapa mata kuliah yang diajarkan di kampus, seperti pertanian dan teknik, tak sesuai dengan budaya Afghanistan serta melanggar prinsip-prinsip Islam.

Tak berselang lama setelah itu, Taliban memutuskan melarang perempuan Afghanistan bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Sebelumnya Taliban juga telah menerapkan larangan bagi perempuan untuk berkunjung ke taman, pasar malam, pusat kebugaran, dan pemandian umum.

Taliban pun melarang perempuan bepergian sendiri tanpa didampingi saudara laki-lakinya. Ketika berada di ruang publik, perempuan Afghanistan diwajibkan mengenakan hijab.

Serangkaian kebijakan Taliban yang 'menindas' kehidupan perempuan Afghanistan itu telah dikecam dunia internasional. Hingga saat ini belum ada satu pun negara yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Salah satu alasannya adalah karena belum dipenuhinya hak-hak dasar kaum perempuan di sana. ● gul